

**TINJAUAN YURIDIS KONSEKUENSI PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT
DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN ARBITRASE ANTARA DEBITUR
DAN KREDITUR**

SKRIPSI



PRO PATRIA

Disusun Oleh:

DEFERIT HASUDUNGAN TANJUNG

NIM: 02112076

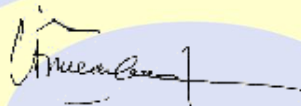
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2017

SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI

Pada tanggal 21 Februari 2017

Oleh Dosen Pembimbing :



SOEMALI, S.H., MH



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama

PRO PATRIA



Tahegga Priyuananda Alfath, SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 23 Februari 2017

Oleh Dosen Pembimbing :



SOEMALI, S.H., M.Hum

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



PRO PATRIA

Tahegga Primananda Alfath, SIL., MH.

ABSTRAK
Defrit Hasudungan Tanjung
02112076

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum. Namun demikian tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. Salah satunya ialah sengketa tentang pailit. Pasal 300 UUK-PKPU menyatakan bahwa badan yang berwenang menyelesaikan permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga. Kemudian pasal 303 UUK-PKPU menegaskan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang di antara para pihak memuat klausula arbitrase. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan terjadinya pailit debitor yang terkait dalam perjanjian arbitrase maupun debitor yang berperkara sebagai pemohon di lembaga arbitrase.

Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data dan ketentuan Undang-Undang yang terkait. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil : **Pertama**, konsekuensi putusan permohonan pailit debitor terhadap kesepakatan penyelesaian melalui arbitrase antara debitor dan kreditur ialah putusan pernyataan pailit debitor tidak membatalkan perjanjian arbitrase tersebut. **Kedua**, kewenangan debitor yang telah dinyatakan pailit dalam meneruskan perkaranya selaku pemohon di lembaga arbitrase pada prinsipnya dialihkan kepada kurator.

Abstract
Defrit Hasudungan Tanjung
02112076

Arbitration means a method of setting civil disputes outside the general court, however disputes that cannot be settled amicably under the regulations and the force of law may not be resolved by arbitration, among others is a petition for declaration of bankruptcy. Based on article 300 paragraph (1) UUK-PKPU, the commercial court has an absolute competency to examine and adjudicate the petition for declaration of bankruptcy or PKPU. Furthermore, article 303 UUK-PKPU stipulate that the Commercial court shall remain be competent to examine and adjudicate the petition for declaration of bankruptcy from contracting parties containing arbitration clause provided that the debt being basis of application for bankruptcy has fulfilled the requirement as referred to in article 2 paragraph 1 UUK-PKPU.

*The method used for this research based on normative juridical approaching through descriptive analysis solving pursuant to data and regulation regarding bankruptcy law and arbitration law in Indonesia. the results obtained from these research is: **First**, bankruptcy declaration decision will not invalidate the application of the pre-bankruptcy arbitration agreement. **Second**, the authority of the bankrupt debtor in forwarding his case as the applicant in the on-going arbitration proceeding will be taken over by the curator since the bankrupt.*

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak (Bahasa Indonesia)	vi
Abstract (Bahasa Inggris)	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Permasalahan :Latar belakang dan Rumusan	1
1.2 Penjelasan Judul	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Pendekatan masalah	10
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	12
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	12
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika	13

BAB II KONSEKUENSI PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITOR

TERHADAP PERJANJIAN ARBITRASE ANTARA DEBITOR DAN KREDITOR

Arbitrase Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar

Pengadilan 14

2.1 Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase 22

2.2 Konsekuensi Terhadap Putusan Pailit Setelah Putusan Arbitrase 30

BAB III PUTUSAN PAILIT DEBITOR YANG SEDANG DALAM

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ARBITRASE 36

3.1 Penyelesaian Sengketa Yang Sedang Berjalan Paska Putusan Pernyataan

Pailit 36

3.2 Konsekuensi Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Perjanjian

Arbitrase Antara Debitor dan Kreditor 45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 51

4.1 Kesimpulan 51

4.2 Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN

1. Konsekuensi putusan pernyataan pailit debitor terhadap perjanjian arbitrase antara debitor dan kreditor ialah putusan pernyataan pailit debitor tidak membatalkan perjanjian arbitrase tersebut. Perjanjian arbitrase tetap berlaku secara sah dan mengikat debitor pailit dengan kreditornya. Namun demikian, pelaksanaan perjanjian arbitrase tersebut dalam proses kepailitan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat memaksa.
2. Kewenangan debitor yang telah dinyatakan pailit dalam meneruskan perkaranya selaku pemohon di lembaga arbitrase pada prinsipnya dialihkan kepada kurator. Dengan demikian, apabila dalam proses kepailitan terdapat suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitor pailit dan yang sedang berjalan di forum arbitrase, oleh karena debitor pailit tidak lagi berwenang menguasai dan mengurus harta kekayaannya, kurator akan mengambil alih kedudukan debitor pailit sebagai pemohon dalam perkara tersebut. Namun demikian, apabila kurator menolak untuk mengambil alih kedudukan debitor pailit dan termohon dalam perkara tersebut tidak memohonkan agar perkara digugurkan, perkara tersebut dapat diteruskan antara debitor pailit dengan termohon diluar tanggungan harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo (eds.), Prosiding : *Interaksi Antara Arbitrase dan Proses Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum (PPH), Jakarta, 2010
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- H. Sudiarto & Zaeni Asyhadie, *Mengenai Arbitrase, salah satu alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta, 2004,
- Huala Adolf, *Syarat Tertulis dan Independensi Klausula Arbitrase*, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia No.6, 2009
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.64
- Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention of the Recognition and Enforce-ment of Foreing Arbitral Award, PERMA NoMOR 1 Tahun 1990*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung, 1992.
- Rony Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1999
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung, 1992
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

Tumbuan, Fred B.G., “*Dampak Arbitrase Terhadap Kepailitan*”, dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo (eds.), *Prosiding : Interaksi Antara Arbitrase dan Proses Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum (PPH), Jakarta, 2004.

2. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Internet

www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-arbitrase-dalam-hukum.html